

INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF BORDER REGIONS

Agus Suroso¹⁾

Nuryanti Taufik²⁾

E-mail : as_roso2010@yahoo.com

nuryanti.wibawa@gmail.com

¹⁾Lecturer of Management Program in Economics Faculty

²⁾Pascasarjana Student of Magister Sains
Jenderal Soedirman University

ABSTRACT

This is a case study on the potential of the border area entitled “Investment and Development of Border Regions”. The purpose of this study was to determine the pattern of economic growth, potential sectors and regional development policies and programs of the border of Central Java and West Java. There are three areas in this paper, including Cilacap, Banjar and Ciamis region.

From the analysis of each area, found that each region has an investment opportunity that has not been developed maximally. The lack of inter-regional cooperation across various sectors, a major factor is less maximum development of the border region. The implication of this research is the need for cooperation among local governments of each border region with investors and the public to the potential and investment opportunities of each region can be developed to its full potential and be beneficial to all parties.

The forms of collaboration can be carried out by the border region Cilacap, Banjar and Ciamis, that is Commodity Collaboration, Trails Partnership, Accessibility Collaboration, System Information Collaboration, Partnership Marketing Commodity and Rest Area Regional Border Collaboration and other collaboration.

Keywords: *Border Regions, Collaboration, Investment*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus mengenai potensi daerah perbatasan dengan judul Peluang Investasi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor potensial dan kebijakan serta program pengembangan

wilayah daerah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian Selatan. Terdapat tiga daerah yang menjadi pembahasan mengenai pengembangan kawasan perbatasan ini, diantaranya adalah Kabupaten Cilacap, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Dari hasil analisis setiap daerah, diperoleh bahwa masing-masing daerah memiliki peluang investasi yang belum dikembangkan secara maksimal. Kurangnya kerjasama antar daerah diberbagai sektor menjadi faktor utama kurang maksimalnya pengembangan kawasan perbatasan tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah harus ada kerjasama antar pemerintah daerah dari masing-masing wilayah perbatasan dengan para investor dan masyarakat agar potensi dan peluang investasi dari masing-masing daerah bisa dikembangkan secara maksimal dan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Adapun bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh wilayah perbatasan Kabupaten Cilacap, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis adalah Peluang Kerjasama Komoditas, Peluang Kerjasama Jalur Wisata, Peluang Kerjasama Aksesibilitas, Peluang Kerjasama Akses Informasi, Peluang Kerjasama Pemasaran Komoditas Unggulan dan Peluang Kerjasama Rest Area Wilayah Perbatasan dan kerjasama lainnya.

Kata Kunci : Wilayah Perbatasan, Kerjasama, Investasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahannya. Masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya dan berhak melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau daerah lain demi kepentingan bersama. Adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan seluruh komponen daerah. Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah dan supremasi hukum. Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali, mengolah dan memberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya

manusia (SDM) daerahnya. Kegiatan tersebut perlu dilakukan pada seluruh kawasan secara merata baik di perkotaan, perdesaan dan wilayah perbatasan. Agar gerak laju dan dinamika pembangunan menjadi lebih cepat dan kokoh maka diperlukan kerjasama dan koordinasi pembangunan dengan daerah perbatasan.

Dalam kenyataan, kita mengenal batas wilayah administratif (sesuai peraturan perundangan), dan batas wilayah fungsional (sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif). Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut.

Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah. Kenaikan tingkat produksi riil dan meningkatnya taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Namun dalam proses perkembangan wilayah ada daerah yang perkembangan ekonomi wilayah relatif cepat dan ada daerah yang perkembangan ekonomi wilayahnya relatif lambat sehingga menyebabkan munculnya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Perbedaan kondisi geografis, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur suatu wilayah menyebabkan tingkat kemampuan berkembang suatu wilayah juga berbeda-beda (Bendavid-Val, 1983 : 6). Untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan (Arsyad,1999: 109).

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Pentingnya kerjasama antar daerah dipicu adanya isu daerah perbatasan yang cenderung memiliki kualitas yang rendah dalam bidang pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan belum representatif dan rendahnya daya saing. Melalui kerjasama perbatasan diharapkan terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Daerah perbatasan Propinsi Jawa Tengah Bagian Selatan tergabung dalam kawasan Kabupaten Cilacap, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Untuk meningkatkan Pembangunan Wilayah Kabupaten diperbatasan provinsi Jawa Tengah bagian selatan, diperlukan suatu Kebijakan Pengembangan Wilayah yang terarah dan sesuai dengan potensi ekonomi wilayah yang terdapat pada masing-masing kecamatan di wilayah perbatasan tersebut. Dengan mengetahui potensi dan pola pertumbuhan ekonomi wilayah di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten perbatasan Provinsi

Jawa Tengah bagian selatan, diharapkan Kebijakan dan Program Pengembangan Wilayah yang di terapkan untuk mengembangkan wilayah perbatasan tersebut akan menjadi lebih jelas arahnya.

B. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor yang potensial dan dapat dikembangkan pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui kebijakan dan program pengembangan wilayah yang dapat diterapkan untuk masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis.

C. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. dalam membuat Perencanaan dan Kebijakan dan Program Pembangunan di masa datang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai pedoman tambahan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan wilayah Kecamatan di Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis..

2. Bagi Investor
Investor dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai peluang dan potensi investasi di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi Daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut.

Tujuan utama dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan peluang kerja masyarakat daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah, menciptakan distribusi pendapatan masyarakat yang merata di daerah tersebut dan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier.

Pemerintah daerah bersama masyarakat harus secara bersama-sama melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan (Arsyad , 1999) :

1. Pembentukan institusi-institusi baru.
2. Pembangunan industri-industri alternatif.
3. Perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik.
4. Pembangunan perusahaan-perusahaan baru.
5. Identifikasi pasar-pasar baru.
6. Alih ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah hendaknya mempertimbangkan strategi penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah yang meliputi potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan serta kelembagaan . Pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang akan merubah struktur ekonomi suatu daerah dari kegiatan ekonomi tradisional yaitu kegiatan sektor pertanian berkembang ke sektor industri yang mendukung perkembangan sektor pertanian maupun ke sektor industri modern dan sektor jasa.

B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan kenaikan kemampuan suatu daerah untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduknya dalam jangka panjang, sesuai dengan kemajuan teknologi secara luas dan efisien penggunaannya. (Arsyad , 1999). Perekonomian suatu daerah mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi dalam tahun tertentu lebih tinggi dibandingkan

kegiatan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan tanpa merubah distribusi pendapatan tidak akan berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan distribusi pendapatan akan mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara nyata, karena mulai bekerjanya dua kekuatan yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Gupta (dalam Budiharsono, 1990) kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah (1) pergeseran pendapatan kepada penduduk golongan miskin akan merubah pola permintaan barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor padat karya, (2) pergeseran pendapatan kepada penduduk golongan miskin akan mengurangi volume impor, dengan asumsi bahwa kecenderungan dari penduduk golongan miskin untuk mengimpor kurang dari rata-rata, (3) dengan mengasumsikan penduduk golongan miskin mempunyai kecenderungan mengkonsumsi lebih tinggi maka sektor yang *demand oriented* akan meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi lebih cepat, (4) perbaikan standar hidup akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan permodalan. Sedangkan kekuatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah (1) Tabungan agregate akan menurun karena penduduk golongan miskin mempunyai kecenderungan

menabung yang relative rendah, (2) Volume ekspor menurun karena konsumsi domestik cenderung meningkat. Menurut Myrdal (1957), dalam proses pertumbuhan ekonomi apabila secara geografis ada daerah maju dan daerah terbelakang, maka akan ada arus tenaga kerja, investasi dan perdagangan ke daerah yang maju, hal ini akan menyebabkan daerah yang maju semakin maju dan daerah yang terbelakang semakin terbelakang. Melebarnya kesenjangan antar daerah dipengaruhi oleh *Backwash Effect* dan *Spread Effect* kemajuan kota terhadap daerah sekitarnya (*hinterline*-nya). Dalam persaingan sempurna apabila *Backwash Effect* mendominasi *Spread effect* maka kesenjangan antar daerah semakin *divergen* atau sebaliknya *konvergen*. Dalam jangka panjang menurut Myrdal pendapatan per kapita daerah cenderung menyebar sebagai akibat peningkatan skala ekonomi dan adanya proses aglomerasi.

Hirschman (1958), berpendapat sama dengan Myrdal bahwa pertumbuhan ekonomi pada awalnya cenderung terkonsentrasi pada suatu daerah tertentu karena rendahnya ongkos produksi / efisiensi produksi, lokasi strategis menguntungkan bagi aglomerasi perusahaan, dan pengembangan pasar yang relative baik. Apabila kekuatan yang dominan adalah *trickle down effect*, awal perkembangan suatu daerah mengalami keterbatasan sumber daya alam dan perkembangan pasar sehingga terjadi *diseconomic of scale*, daerah tersebut terpaksa harus mengambil sumber daya alam dari daerah lain yang berlimpah

complementary effect sehingga dalam jangka panjang kesenjangan antar wilayah *regional disparity* akan berkurang. Menurut Hirschman, dalam jangka panjang kesenjangan pendapatan per kapita antar daerah akan berkurang dengan adanya *regional linkage*. Friedman's (1966) memperkenalkan proses pembangunan spasial dengan model *Core-periphery model*, merupakan model pembangunan di jantung kota yang menekankan pembangunan ekonomi mempunyai kecenderungan untuk berkonsentrasi pada suatu daerah pusat kota yang diawali oleh arus urbanisasi yang kemudian diikuti oleh pembangunan sarana prasarana.

Francois Perroux (1950), memperkenalkan "*Poles de Croissance* atau *Growth Poles Theory*. Teori ini didasarkan pada pengembangan industri industri utama (*leading Industry*) dan pengaruh perkembangannya terhadap wilayah hinterland nya baik secara *forward linkages* dan *back ward linkages* di dalam sistem ekonomi akan menimbulkan pemusatan ekonomi (*agglomeration economics*) dengan meningkatnya lokasi efisiensi di daerah pusat industri tersebut. Hal ini merupakan fenomena jangka pendek. Dalam jangka panjang akan terjadi penurunan hasil marginal dari tenaga kerja dan modal di kota tersebut, terjadinya proses pemusatan-pemusatan (*spatial convergence*) yang dapat menghasilkan persamaan pendapatan per kapita antar daerah. Williamson (1950) dalam suatu studi pembangunan wilayah mengamati tahapan pembangunan suatu wilayah, bahwa ketimpangan antar wilayah

dalam tahap awal pembangunan merupakan suatu hal yang wajar karena ada perbedaan sumber daya alam, kemudian tahap selanjutnya ketimpangan tersebut akan menurun dengan sendirinya sebagai implikasi kebijakan pembangunan interregional yang sesuai dengan kondisi wilayah yang bersangkutan.

Dengan mengamati studi empiris analisis pertumbuhan wilayah yang dilakukan oleh Gurnar Myrdal, Friedman, Hirschman, Gupta, Williamson maupun Francois Perroux pada tahap awal pertumbuhan ada perbedaan kecepatan pertumbuhan suatu wilayah, sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah terutama dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka panjang perbedaan pertumbuhan maupun ketimpangan antar wilayah dapat dikurangi.

C. Konsep Pengembangan Wilayah.

Dalam pembangunan suatu wilayah diperlukan suatu kebijakan perencanaan yang dapat mengatasi perbedaan potensi wilayah baik sumberdaya alam, letak/lokasi strategis, infrastruktur yang tersedia dalam suatu wilayah sehingga tahap pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah dapat berjalan dengan ketimpangan yang relatif kecil.

Strategi kebijakan perencanaan pembangunan wilayah intinya adalah bagaimana menciptakan perluasan pertumbuhan dan pembangunan seluruh wilayah geografis. Ada empat strategi kebijakan pengembangan wilayah yang dapat diterapkan dalam suatu wilayah :

1. Strategi pengembangan Kutub-Kutub Pertumbuhan.
2. Strategi Agropolitan.
3. Strategi Pengembangan Kota - Kota Kecil.
4. Strategi Pengembangan Ruang Terintegrasi.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Metode Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan Studi Kasus : Pengembangan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan data primer hasil survey dan pengamatan di lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari BPS, Bappeda, Kantor Kecamatan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar. Periode penelitian Pola Pengembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar antara tahun 2009 sampai tahun 2011.

B. Metode Analisis.

1. Analisis Klassen Typology (Pola Pertumbuhan Wilayah)

Analisis *Klassen Typology* ini untuk melihat gambaran pola pertumbuhan ekonomi wilayah (Syahrizal , 1999) tiap kecamatan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar. Dengan analisis Klasen Typologi dapat diketahui empat klasifikasi pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar, yaitu Kecamatan yang maju dan tumbuh cepat (*Rapid Growth Region*), Kecamatan yang tertekan

(*Retarded Region*), Kecamatan yang sedang tumbuh (*Growing Region*) dan Kecamatan yang relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*). Kriteria klasifikasi pertumbuhan Kecamatan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar ada 4 klasifikasi, yaitu :

- a. **Kecamatan Maju dan Tumbuh Cepat**, adalah kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar
- b. **Kecamatan Maju tetapi Tertekan** adalah kecamatan yang relatif telah maju, tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan.
- c. **Kecamatan Berkembang Cepat** adalah kecamatan dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tetapi masih belum di olah sepenuhnya secara baik. Karena itu walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi kecamatan sangat tinggi namun tingkat pendapatan per kapita yang mencerminkan pembangunan masih relative rendah.
- d. **Kecamatan yang Relative Tertinggal** adalah kecamatan yang tingkat kemakmuran masyarakatnya maupun tingkat pertumbuhan ekonominya masih relative rendah.

2. Analisis Potensi Sektor Ekonomi

Pada analisis potensi masing-masing sektor ekonomi dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pendekatan potensi sub sektoral dengan mengkombinasikan data sekunder tiap kecamatan dan kondisi riil di lapangan baik dalam analisis LQ, MRP, maupun pada tahap Overlay. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analisis Overlay* untuk melihat diskripsi sektor ekonomi yang potensial dengan menggabungkan antara kriteria pertumbuhan dari hasil perhitungan Model Ratio Pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi dari hasil perhitungan Location Quotient (LQ) sehingga dapat diketahui sektor yang potensial dan dapat dikembangkan di tingkat Kecamatan Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar.

a. Location Quotient :

Metode ini merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. (Warpani ,1988)

Formulasi model Location Quotient :

$$LQ = \frac{Y_{ij}/Y_j}{Y_i/Y}$$

Keterangan :

LQ : Location Quotient.

Y_{ij} : PDRB sektor i pada daerah Kecamatan/Kabupaten ke j.

Y_j : PDRB di daerah Kecamatan/Kabupaten ke j.

Y_i : PDRB Kabupaten/Propinsi sector i.

Y : PDRB Kabupaten/Propinsi.

Kriteria analisa yang digunakan adalah :

1. Bila $LQ > 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis/ekspor.
2. Bila $LQ < 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis/lokal.

b. Model Ratio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP dilakukan untuk melihat deskripsi sektor ekonomi wilayah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik secara eksternal maupun internal (Yusuf, 1999) Pendekatan analisis ini ada dua yaitu melihat rasio pertumbuhan wilayah referensi dan rasio pertumbuhan wilayah studi. wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi.

3. Analisis Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan.

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Wilayah Kecamatan yang diterapkan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar didasarkan pada Strategi Pengembangan Ruang Terintegrasi sehingga diharapkan tercapai keseimbangan perkembangan ekonomi wilayah baik pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan.

Kebijakan ini merupakan kombinasi kebijakan ekonomi sektoral Kabupaten Cilacap dan Kota

Banjar dan Kabupaten Ciamis dengan mempertimbangkan; *Pola Pertumbuhan dan Potensi Wilayah Kecamatan; Isu-Isu Strategis Pengembangan Wilayah Kecamatan Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis; Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis dengan melihat Arah Kecenderungan Perkembangan Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis ; Pergerakan penduduk internal/eksternal serta Perkembangan aksesibilitas / transportasi wilayah Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis.*

HASIL ANALISIS

1. Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan

a. Kabupaten Cilacap

▪ Kondisi Wilayah

Luas wilayah 225,361 ha

Iklm tropis

Terdiri dari 24 kecamatan

$07^{\circ}30' - 07^{\circ}45'LS$ dan

$108^{\circ}4' - 109^{\circ}30' BT$

▪ Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes.

Timur : Kabupaten Kebumen

Selatan : Laut Indonesia

Barat : Provinsi Jawa Barat

Cilacap,
 Kecamatan
 Wanareja
 Kabupaten
 Cilacap.
 Timur : Kecamatan
 Lakbok
 Kabupaten
 Ciamis dan
 Kecamatan
 Wanareja
 Kabupaten
 Cilacap
 Selatan : Kecamatan
 Cimaragas
 Kabupaten
 Ciamis,
 Kecamatan
 Pamarican
 Kabupaten
 Ciamis,
 Kecamatan
 Purwodadi
 Kabupaten
 Ciamis,
 Kecamatan

Lakbok
 Kabupaten
 Ciamis
 Barat : Kecamatan
 Cimaragas
 Kabupaten
 Ciamis,
 Kecamatan
 Cijeunjing
 Kabupaten
 Ciamis



Gambar 2 Peta Wilayah Kota Banjar

▪ Demografi

Tabel: 3

Demografi Kota Banjar Tahun 2008, 2009, 2010

Demografi	2008	2009	2010
Jumlah penduduk	180.767 jiwa	183.046 jiwa	185.043 jiwa
Angkatan Kerja	5.565 jiwa	3.783 jiwa	3.870 jiwa

▪ Perekonomian Daerah

1. Keuangan Daerah

Realisasi pemerintah daerah tahun 2010 sebesar Rp. 384,144 milyar dimana pos pendapatan aslindaerah sebesar 9,73 persen dari total penerimaan. Dana penerimaan daerah terbesar masih dari dana

perimbangan sebesar 72,21 persen.

Alokasi penerimaan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 218,835 milyar atau 60,46 persen dan sisanya sebesar Rp. 143,13 milyar untuk belanja langsung (39,54 persen)

2. Perbankan

Posisi dana perbankan akhir tahun 2010 menurut data dari Bank Indonesia Tasik Malaya yaitu sebesar Rp. 530,66 miliar, berupa deposito sebesar 72,32 persen, tabungan sebesar 16,78 persen dan sisanya berupa giro sebanyak 10,90 persen.

Sedangkan posisi kredit perbankan di wilayah Kota Banjar terserap untuk kredit konsumsi sebesar 51,90 persen, kredit modal kerja 47,47 persen, sedangkan kredit investasi hanya 0,63 persen.

3. Koperasi

Data statistic lembaga keuangan bukan bank

berupa KUD menurut Dinas Perindagkop Kota Banjar, populasiya tercatat hanya tinggal 2 buah yang aktif, dengan jumlah anggota sebanyak 5.878. Sedangkan yang non KUD terdapat 149 buah dengan anggota 16.143.

4. Pegadaian

Data Kegiatan Perum Pegadaian Cabang Banjar diantaranya menunjukkan, barang jaminan yang dilelang di tahun 2010 mencapai sebanyak 661 buah dan jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 159 buah.

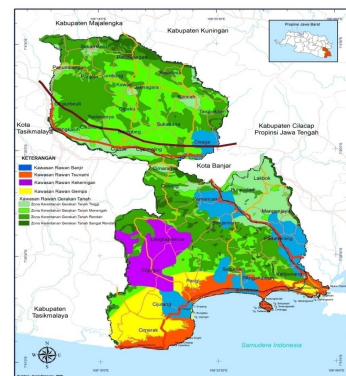
Tabel: 4
PDRB dan Tingkat Inflasi Kota Banjar
Tahun 2008, 2009, 2010

	2008	2009	2010
PDRB Atas dasar harga berlaku	1.433.562,27	1.592.876,70	1.769.538,79
Inflasi	6,02	5,69	11,52

c. Kabupaten Ciamis

- Kondisi wilayah,
Luas wilayah 2.444 km^2
Iklim tropis
 $07^{\circ}40' - 07^{\circ}41'LS$ dan
 $108^{\circ}20' - 108^{\circ}40' BT$
- Batas wilayah,
Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.
Timur : Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah

Selatan: Samudra Hindia
Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya



- Demografi

Tabel: 5

Demografi Kabupaten Ciamis Tahun 2008, 2009, 2010

Demografi	2008	2009	2010
Jumlah penduduk	1.616.778 jiwa	1.605.414 jiwa	1.720.280 jiwa
Kepadatan penduduk	661/ <i>km</i> ²	657/ <i>km</i> ²	704/ <i>km</i> ²
Angkatan Kerja	21.886 jiwa	24.358 jiwa	25.792 jiwa

- Preekonomian Daerah

Tabel: 6

PDRB dan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2008, 2009, 2010

	2008	2009	2010
PDRB Atas dasar harga berlaku	14.501.906,13	15.841.182,85	17.572.448,10
Inflasi	9,53	4,12	9,92

2. Analisis Location Quotien

Tabel: 7

Perbandingan PDRB Cilacap dan Jawa Tengah

No	Sektor	Cilacap			Jawa Tengah		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Pertanian	4.786,99	5203,23	5.766,72	72.862.985,73	79.342.553,91	86.372.005,95
2	Pertambangan	514,34	566,51	616,68	3.514.457,82	3.852.796,77	4.302.563,07
3	Perindustrian	54.775,41	54.113,76	57.528,94	125.006.771,42	130.352.154,42	146.155.156,78
4	Perdagangan	17.560,45	20.567,74	23.856,57	71.617.054,69	78.262.543,48	86.998.316,32
5.	Jasa - jasa	1.255,11	1.442,79	1.600,25	35.480.336,36	39.246.429,89	46.599.865,32
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	172,82	182,34	192,61	3.749.439,12	4.114.517,64	4.645.499,82
7.	Konstruksi	739,17	837,92	923,80	21.196.201,77	24.448.721,40	27.124.582,63
8.	Pengangkutan	1.198,15	1.359,59	1.589,96	21.091.610,95	23.836.789,16	26.298.747,14
9.	Jasa Dunia Usaha	775,39	873,24	991,92	12.617.097,04	14.447.437,07	15.899.731,16

Pada perbandingan PDRB Cilacap dari tahun 2008 sampai dengan 2010, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, listrik, gas dan air bersih konstruksi, pengangkutan dan jasa

dunia usaha mengalami kenaikan. Tapi dari tabel diatas, sektor perindustrian adalah sektor yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Cilacap. Sehingga sektor Perindustrian merupakan sektor unggulan Kabupaten Cilacap.

Tabel: 8
LQ Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah

No	Sektor	Cilacap			Rata
		2008	2009	2010	
1	Pertanian	0.294	0.306	0.318	0.306
2	Pertambangan	0.657	0.687	0.684	0.676
3	Perindustrian	1.967	1.939	1.879	1.928
4	Perdagangan	1.100	1.228	1.309	1.212
5.	Jasa – jasa	0.158	0.171	0.163	0.164
6.	Listrik,Gas dan Air Bersih	0.206	0.207	0.197	0.204
7.	Konstruksi	0.156	0.160	0.162	0.159
8.	Pengangkutan	0.255	0.266	0.288	0.270
9.	Jasa Dunia Usaha	0.275	0.282	0.297	0.285

Berdasarkan tabel LQ diatas, Kabupaten Cilacap memiliki 2 sektor basis dan 7 sektor non basis. Sektor basis di Kabupaten Cilacap yaitu sektor perindustrian dan perdagangan. Sedangkan 7 sektor non basis Kabupaten Brebes adalah pertambangan, jasa, listrik gas dan air bersih, konstruksi, pengangkutan, jasa dunia usaha. Kriteria ini dilihat dari apabila $LQ > 1$ artinya bahwa komoditas tersebut menjadi basis atau sumber pertumbuhan ekonomi. Komoditas memiliki keunggulan komparatif yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah tetapi bisa diekspor ke luar daerah. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Apabila $LQ < 1$, artinya bahwa sektor tersebut tidak menjadi sektor basis. Komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya belum bisa memenuhi kebutuhan daerah dan masih harus mengimpor dari daerah lain. komoditas ini

ditetapkan sebagai komoditas non unggulan.

Nilai LQ yang tinggi bukan berarti mencerminkan tingginya nilai komoditas yang dihasilkan oleh sektor tertentu di daerah, namun nilai itu adalah nilai relatif terhadap share komoditas sektor tertentu di kabupaten dengan komoditas sektor tertentu di propinsi. Komoditas tertentu bisa jadi dalam perhitungan LQ merupakan komoditas dari sektor non basis akan tetapi realita di lapangan justru komoditas tersebut adalah komoditas unik dan menjadi produk utama kebanggaan daerah seperti komoditas kerupuk tenggiri, batik, dan anyaman bambu di Kabupaten Cilacap.

Sektor basis yang merupakan sektor unggulan daerah perlu ditingkatkan kembali baik secara kualitas dan kuantitas. Sektor basis memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan PDRB. Sektor non basis pun perlu.

Tabel: 9
Perbandingan PDRB Kota Banjar dan Jawa Barat

No	Sektor	Banjar Patroman			Jawa barat		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Pertanian	249.821,76	274.659,50	303.730,87	72.517.608	85.149.263	97.194.393
2	Pertambangan	4.497,21	4.844,28	5.369,05	14.904.132	13.278.186	15.546.259
3	Perindustrian	170.522,49	187.370,10	206.008,58	253.439.396	260.450.952	270.820.659
4	Perdagangan	459.656,82	537.294,38	609.990,47	129.912.046	149.056.003	172.713.197
5.	Jasa – jasa	246.267,55	257.594,67	258.171,59	47.095.619	56.686.561	68.318.686
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	15.183,01	16.284,16	18.034,17	16.913.616	19.549.186	21.294.460
7.	Konstruksi	97.335,38	109.006,79	121.689,96	21.596.583	24.223.185	29.047.786
8.	Pengangkutan	102.623,78	112.185,77	119.153,31	36.401.476	41.820.990	54.635.684
9.	Jasa Dunia Usaha	87.654,27	93.577,06	100.390,78	17.228.057	18.802.857	21.155.315

Pada perbandingan PDRB Banjar Patroman dari tahun 2008 sampai dengan 2010, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, pengangkutan dan jasa dunia usaha

mengalami kenaikan. Tapi dari tabel diatas, sektor perdagangan adalah sektor yang menyumbang PDRB terbesar Kota Banjar Patroman. Sehingga sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan Kabupaten Cilacap.

Tabel: 10
LQ Kota Banjar dan Jawa Barat

No	Sektor	Banjar Patroman			Rata
		2008	2009	2010	
1	Pertanian	1,447	1,447	1,345	1,390
2	Pertambangan	0,129	0,164	0,149	0,143
3	Perindustrian	0,286	0,323	0,328	0,305
4	Perdagangan	1,505	1,617	1,521	1,514
5.	Jasa – jasa	2,225	2,038	1,628	1,920
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,382	0,373	0,365	0,365
7.	Konstruksi	1,918	2,018	1,805	1,870
8.	Pengangkutan	1,200	1,127	0,939	1,088
9.	Jasa Dunia Usaha	2,165	2,090	2,044	2,099

Berdasarkan tabel LQ diatas, Kota Banjar Patroman memiliki 6 sektor basis dan 3 sektor non basis. Sektor basis di Kota Banjar Patroman yaitu sektor pertanian, perdagangan, jasa, konstruksi, pengangkutan dan jasa duni

usaha. Sedangkan 3 sektor non basis Kota Banjar Patroman adalah pertambangan, perindustrian, listrik gas dan air bersih. Kriteria ini dilihat dari apabila $LQ > 1$ artinya bahwa komoditas tersebut menjadi basis atau sumber pertumbuhan

ekonomi. Komoditas memiliki keunggulan komparatif yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah tetapi bisa diekspor ke luar daerah. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Apabila $LQ < 1$, artinya bahwa sektor tersebut tidak menjadi sektor basis. Komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya belum bisa memenuhi kebutuhan daerah dan masih harus mengimpor dari daerah lain. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas non unggulan.

Nilai LQ yang tinggi bukan berarti mencerminkan tingginya nilai komoditas yang dihasilkan oleh sektor tertentu di daerah, namun nilai

itu adalah nilai relatif terhadap share komoditas sektor tertentu di kabupaten dengan komoditas sektor tertentu di propinsi. Komoditas tertentu bisa jadi dalam perhitungan LQ merupakan komoditas dari sektor non basis akan tetapi realita di lapangan justru komoditas tersebut adalah komoditas unik dan menjadi produk utama kebanggaan daerah seperti komoditas pertanian di Kota Banjar Patroman. Sektor basis yang merupakan sektor unggulan daerah perlu ditingkatkan kembali baik secara kualitas dan kuantitas. Sektor basis memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan PDRB. Sektor non basis pun perlu.

Tabel: 11
Perbandingan PDRB Kabupaten Ciamis dan Jawa Barat

No	Sektor	Ciamis			Jawa barat		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Pertanian	2.104346,01	2.146.691,76	2.206.873,80	72.517.608	85.149.263	97.194.393
2	Pertambangan	23.794,27	23.818,10	24.258,16	14.904.132	13.278.186	15.546.259
3	Perindustrian	463.398,22	496.904,52	529.482,65	253.439.396	260.450.952	270.820.659
4	Perdagangan	1.714.220,57	1.840.447,54	1.970.731,95	129.912.046	149.056.003	172.713.197
5.	Jasa – jasa	1.081.199,02	1.156.205,28	1.235.809,84	47.095.619	56.686.561	68.318.686
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	40.707,79	44.658,54	49.955,56	16.913.616	19.549.186	21.294.460
7.	Konstruksi	377.455,42	388.422,84	394.451,63	21.596.583	24.223.185	29.047.786
8.	Pengangkutan	568.225,24	590.034,99	610.690,74	36.401.476	41.820.990	54.635.684
9.	Jasa Dunia Usaha	366.445,99	384.009,54	407.603,03	17.228.057	18.802.857	21.155.315

Pada perbandingan PDRB Ciamis dari tahun 2008 sampai dengan 2010, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, pengangkutan dan jasa

dunia usaha mengalami kenaikan. Tapi dari tabel diatas, sektor perdagangan adalah sektor yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Ciamis. Sehingga sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan Kabupaten Ciamis.

Tabel: 12
LQ Kabupaten Ciamis dan Jawa Barat

No	Sektor	Ciamis			Rata
		2008	2009	2010	
1	Pertanian	2.626	2.385	2.294	2.435
2	Pertambangan	0.144	0.169	0.157	0.157
3	Perindustrian	0.165	0.180	0.197	0.181
4	Perdagangan	1.194	1.168	1.153	1.171
5.	Jasa – jasa	2.077	1.929	1.827	1.945
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.217	0.216	0.237	0.223
7.	Konstruksi	1.581	1.517	1.372	1.490
8.	Pengangkutan	1.412	1.334	1.129	1.292
9.	Jasa Dunia Usaha	1.925	1.932	1.946	1.934

Berdasarkan tabel LQ diatas, Kabupaten Ciamis memiliki 6 sektor basis dan 3 sektor non basis. Sektor basis di Kabupaten Ciamis yaitu sektor pertanian, perdagangan, jasa, konstruksi, pengangkutan dan jasa duni usaha. Sedangkan 3 sektor non basis Kabupaten Ciamis adalah pertambangan, perindustrian, listrik gas dan air bersih. Kriteria ini dilihat dari apabila $LQ > 1$ artinya bahwa komoditas tersebut menjadi basis atau sumber pertumbuhan ekonomi. Komoditas memiliki keunggulan komparatif yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah tetapi bisa diekspor ke luar daerah. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Apabila $LQ < 1$, artinya bahwa sektor tersebut tidak menjadi sektor basis. Komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya belum bisa memenuhi kebutuhan daerah dan masih harus mengimpor dari daerah lain. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas non unggulan.

Nilai LQ yang tinggi bukan berarti mencerminkan tingginya nilai komoditas yang dihasilkan oleh sektor tertentu di daerah, namun nilai itu adalah nilai relatif terhadap share komoditas sektor tertentu di kabupaten dengan komoditas sektor tertentu di propinsi. Komoditas tertentu bisa jadi dalam perhitungan LQ merupakan komoditas dari sektor non basis akan tetapi realita di lapangan justru komoditas tersebut adalah komoditas unik dan menjadi produk utama kebanggaan daerah seperti komoditas pertanian di Kabupaten Ciamis. Sektor basis yang merupakan sektor unggulan daerah perlu ditingkatkan kembali baik secara kualitas dan kuantitas. Sektor basis memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan PDRB. Sektor non basis pun perlu.

3. Analisis Komoditas Unggulan

1. Komoditas unggulan kab Cilacap
Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis berada dibagian selatan

Pulau Jawa serta memiliki pelabuhan yang bertaraf internasional dan merupakan satu-satunya pelabuhan samudera di pantai selatan yang dapat mengakses perdagangan dengan negara-negara di Benua Australia dan negara-negara lainnya.

Dengan wilayah terluas, terpadat penduduknya, potensi keunggulan yang beragam, infrastruktur dan prasarana fisik yang memadai, Cilacap sangat prospektif sebagai tujuan berinvestasi seperti bidang perikanan, kelautan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, industri pariwisata, perdagangan, perumahan dan jasa-jasa lainnya. Dengan adanya infrastruktur dan prasarana fisik yang memadai, Kabupaten Cilacap menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif, situasi keamanan yang stabil, peraturan daerah yang pro investasi, serta dukungan masyarakat yang harmonis.

Adapun komoditas unggulan kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

- a. Batik
Rajamas Batik
Desa Maos Kidul Cilacap
Kapasitas Produksi
12.000 Lembar,
Pemasaran dalam negeri :
Jakarta, Semarang, Bali
Pemasaran Luar Negeri :
Malaysia dan Singapura
- b. Anyaman Bambu
Usaha Karya Tuslam
Desa Banjarwaru, Cilacap
Kapasitas Produksi
45.000 unit
Pemasaran dalam negeri :
Jakarta, Bandung,
Yogyakarta, Bali
- Pemasaran Luar Negeri :
USA, Kanada, Singapura,
Malaysia, Brunai
- c. Stik Sukun
Mahkota DJ
Donan, Cilacap Tengah
Kapasitas Produksi 125
Ton
Pemasaran : Jawa
Tengah, Jawa Barat,
Jakarta
- d. Kerupuk Tenggiri
Cipta Rasa
Tambakreja, Cilacap
Selatan
Kapasitas Produksi 150
Ton
Pemasaran : Jawa Tengah
dan Jawa Barat
SK Rasa
Tambakreja, Cilacap
Selatan
Kapasitas produksi 156
Ton
Pemasaran : Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan
Jakarta
- e. Budi Daya Ikan Gurame
Kelompok Segari
Desa Maos Lor, Cilacap
Kapasitas Produksi 25
Ton/ha/th
Luas lahan 13.000 m²
Pemasaran : Wilayah
Pantura
- f. Kerajinan Patung Asmat
Galeri Asmat
Desa Jeruklegi Wetan,
Cilacap
Kapasitas Produksi
5.700/th
Pemasaran : Jawa
Tengah, Bandung,
Yogyakarta, Jakarta, Bali
- g. Kerajinan Kerang Laut
Pesona Hasil Laut

- Cilacap Selatan
 Kapasitas Produksi 2.400 unit/th
 Pemasaran : Jawa Tengah
- h. Serat Sabut Kelapa Karet
 Desa Tambaksari, Wanareja, Cilacap
 Kapasitas produksi 360 m³
 Pemasaran : Jawa, Sumatra, dan Kalimantan
- i. Nata de Coco
 UD Tirto Sari Kelapa Tambakreja, Kedungreja, Cilacap
 Kapasitas produksi 364.000kg/th
 Pemasaran : Jakarta dan Bogor

2. Komoditas unggulan Kota Banjar
 Kota Banjar Patroman merupakan salah satu kota di wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kota Banjar merupakan kota yang masih sangat berkembang dalam hamper semua sektor perekonomiannya. Kota Banjar diharapkan mampu menjadi kota perdagangan industri karena memiliki wilayah yang cukup strategis. Selain itu, Pemkot Banjar Patroman telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk kepentingan investasi yang maupun meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Adapun komoditas unggulan kabupaten Kota Banjar adalah sebagai berikut :

- a. Sektor Perikanan
 Pengolahan Udang Galah
 Lokasi : Kota Banjar
 Kapasitas Produksi : 65 Ton/tahun

- Pemasaran : pasar lokal dan pasar luar daerah
- b. Sektor Industri
 Pengolahan Susu Kambing PE
 Susu yang dihasilkan kambing Etawa (PE) mempunyai nilai gizi yang tinggi serta berkhasiat untuk kesehatan. Susu Kambing PE diolah kedalam berbagai rasa dan aroma.
 Lokasi : Kota Banjar
 Kapasitas Produksi : 250 Liter/hari
- c. Sektor Pertanian
 Pengembangan Padi Organik
 Tanaman padi organik, melalui penanganan teknologi dalam proses penanaman, pembiitan, pemupukan, memiliki nilai lebih dibandingkan dengan padi pada umumnya.
 Lokasi : Kota Banjar
 Kapasitas Produksi : 14 Ton/ha/tahun

3. Komoditas unggulan kab Ciamis
 a. Pertanian
 Sesuai dengan perkembangan teknologi, sector pertanian dewasa telah ditunjang dengan penerapan teknologi canggih dan penanganan pasca panen yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara umum kondisis pertanian di kabupaten Ciamis sudah relative maju dalam penerapan teknologi dan optimalisasi penggunaan aumber

daya lahan. Dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, kondisi jalan yang berfungsi baik adanya kelompok-kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan, sangat menentukan dari mempercepat keberhasilan sector pertanian.

b. Peternakan

Ternak merupakan komponen yang paling banyak berkaitan dengan produksi lainnya didalam system agribisnis lahan kering, dan menjadi sub system produksi yang mampu dijadikan sumber penghasilan masyarakat disamping sebagai penghasil pupuk organik. Secara umum iklim maupun tanah (tanah vulkanis) di kabupaten Ciamis baik untuk budidaya jenis rumput unggul yang bergizi tinggi, menjadikan tanah lebih produktif dan menguntungkan.

c. Perikanan

Kabupaten ciamis mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang patut di banggakan. Potensi budaya ikan air tawar seluas 3.540 ha., baru bias dimanfaatkan seluas 2.504 ha. (70%). Komoditas unggulan perikanan budidaya air tawar diantaranya ikan mas, gerame, nila gift, udang galah, nilam dan tawes. Untuk perikanan laut tidak kurang dari 33 jenis ikan hasil tangkapan rata-rata pertahun, dengan total produksi baru mencapai 2.500 ton pertahun, karena keterbatasan penggunaan alat tangkap dan perahu nelayan yang masih tradisional. Komoditas perikanan laut, antara lain udang putih, lobster (udang karang)

kakap, bawal, kwrapu, tenggiri dan layur. Selain itu terdapat potensi untuk usaha budidaya maupun penangkapan yang tidak kalah menariknya untuk dikembangkan, yaitu sungai, danau, rawa dan situ.

d. Perkebunan

Berbagai komoditi tanaman perkebunan di kabupaten Ciamis sangat potensial untuk di budidayakan, karena didukung oleh kesuburan tanah yang mampu meningkatkan hasil panen. Pada umumnya penanaman budidaya tanaman perkebunan belum di uahkan secara komersial, sehingga belum dapat meberikan manfaat yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang biasa diusahakan adalah : kelapa, kopi, kakao, lada dan teh.

e. Pertambangan

Kekayaan alam bahan tambang di kabupaten ciamis dengan kandungan deposit tinggi sangat menguntungkan apabila diekplotasi secara komersial. Melalui teknologi terapan penambangan diharapkan mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lokasi bahan tambang tersebar di kecamatan bagian selatan kabupaten ciamis dengan kandungan deposit jutaan meter kubik, terdiri dari batu gamping, fosfat, bentonit, mangan, kalsit, tras, lempung, gambut, zeolit, kwarsa dan, kaolin.

4. Analisis Peluang Investasi

1. Peluang investasi kab Cilacap
 - a. Optimalisasi Rawa Bendungan
 - b. Aquarium Laut
 - c. Pengembangan Pantai Indah
 - d. Industri Pengolahan Kelapa
 - e. Jambu Sari Family Park
 - f. Peternakan Terpadu Kambing
 - g. Peternakan Sapi Potong

2. Peluang investasi Kota Banjar
 - a. Pembangunan Pasar Grosir
 Penyediaan produk yang berharga terjangkau dan berkualitas merupakan salah satu indikator tercapainya stabilitas pembayaran. Pasar Grosir merupakan salah alternatif untuk mendorong berkembangnya sektor perdagangan. Pasar Grosir ini akan menjadi pusat transit dan perdagangan barang dalam skala besar dan mendorong terpusatnya kegiatan ekonomi yang merupakan prospek bagi investor. Wilayah investasi akan direncanakan di dusun Parunglesang Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar, yang merupakan kawasan fungsional yang meliputi sektor jasa dan perdagangan.
 - b. Pembangunan Wahana Situ Mustika
 Situ Mustika yang terletak di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja merupakan salah satu objek wisata andalan Kota Banjar, dengan posisi di pusat kota, lintas jalan Nasional yang melayani transportasi antar Provinsi, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah
 Potensi yang bisa dikembangkan diantaranya adalah :
 - Wisata Kuliner
 - Wahana Pemancingan
 - Wahana Permainan Anak
 - Wisata Air, dll
 - c. Pembangunan Wahana Wisata Air
 Kota Banjar memiliki aliran sungai Citanduy yang tenang dan memungkinkan aliran sungai tersebut untuk dijadikan tempat wahana wisata air dengan cara mengadakan berbagai permainan air dan perahu wisata. Area bermain di sekitar tempat wisata akan

menjadi daya tarik wisata sungai Kota Banjar.

d. Pembangunan

Argowisata Lembah Pejamben

Kota Banjar merupakan kota yang kaya akan potensi objek wisata alam, salah satunya merupakan wisata alam Lembah Pejamben. Lembah Pejamben merupakan objek wisata alam yang mempunyai peluang dan potensi cukup besar bila dikembangkan. Lembah Pejamben terletak di Desa Binangun Kecamatan Pataruman. Lembah Pejamben suatu lembah dengan kondisi topografi daerah perbukitan dan memiliki unsur hara tanah yang cukup subur, potensi yang dapat dikembangkan diantaranya adalah :

- Potensi Kebun Buah
- Wisata Outbond
- Wisata Kuliner, dll

3. Peluang investasi Kabupaten Ciamis

a. Obyek Wisata Green Canyon

Peluang investasi

Pengembangan atraksi interaksi yang bernuansa lingkungan asli dengan

konsep wisata yang tepat, jauh dari kebisingan kota, sehingga alam dapat dinikmati secara utuh. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan lainnya, seperti hotel dan penginapan.

b. Obyek Wisata Pantai Batukaras

Peluang investasi

Kawasan resort yang dapat dikembangkan secara bertahap dan selektif dibatasi dengan luas 25 ha, yang terdiri dari 4-5 unit hotel berikut fasilitas penunjang kepariwisataan lainnya merupakan investasi yang menjanjikan keuntungan.

c. Pengembangan golf course seluas 60 ha

Peluang investasi

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan lainnya seperti hotel, penginapan dan rumah makan.

d. Obyek wisata pantai keusik luhur

Peluang investasi

Pengembangan atraksi safari pantai, memancing, surfing dan natural trail. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan skala kecil sampai dengan skala menengah dilengkapi dengan akomodasi 'low density' dengan konsep privasi yang tinggi.

e. Obyek wisata pantai batu hiu

Peluang investasi

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan lainya seperti hotel, penginapan dan rumah makan.

f. Obyek wisata situ lengkong panjalu

Peluang investasi

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan lainya seperti hotel, penginapan dan rumah makan.

g. Obyek Wista Pantai Pangandaran

Peluang investasi

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan lainya seperti hotel, penginapan dan rumah makan dari yang telah ada sekarang ini.

4. Analisis Peluang Kerjasama Wilayah (Cilacap-Banjar-Ciamis)

a. Peluang Kerjasama Komoditas

Industri Pangan

Kabupaten

Cilacap, Kota Banjar Patroman dan Kabupaten Ciamis merupakan kota yang cukup banyak menghasilkan kelapa, di ketiga daerah ini, kelapa menjadi komoditas unggulan. Kerjasama yang bisa dilakukan adalah membuat Central Industri Kelapa Terpadu. Industri kelapa terpadu adalah

industry yang mengolah semua bagian dari pohon kelapa, daging kelapa bisa diolah menjadi Nata de coco, batok kelapa bisa diolah menjadi kerajinan kelapa yang bernilai seni, serta serabut kelapa.

Industri

Kelapa ini akan berpusat di Kabupaten Cilacap degan pertimbangan Cilacap memiliki akses pemasaran berupa pelabuhan dan lapangan udara sehingga memudahkan proses pemasaran produk hasil olahan industri kelapa terpadu. Ciamis dan Kota Banjar menyuplai komoditas kelapa mereka ke Cilacap kemudian diolah di Cilacap. Tenaga kerja yang diserap di industri kelapa terpadu ini merupakan tenaga kerja dari ketiga wilayah tersebut. Pemasaran hasil olahan industri kelapa ini bisa menjangkau pasar dalam negeri mupun pasar ekspor.

Berdasarkan hasil analisis LQ rata-rata selama tiga tahun terakhir diperoleh

sektor basis Kabupaten Cilacap adalah sektor Perindustrian, sementara untuk Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Pataroman sektor basisnya adalah Pertanian. Kerjasama kelapa terpadu ini sesuai dengan LQ basis masing-masing, Central Kelapa Terpadu akan dibuat di Cilacap dengan sektor basis perindustrian dan Kabupaten Ciamis serta Kota Banjar Patroman mensadi supplier kelapa dengan sektor basis pertanian.

b. Peluang Kerjasama Jalur Wisata

Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Ciamis memiliki wilayah pantai yang cukup menarik bagi destinasi liburan wisatawan, dan Kota Banjar merupakan wilayah penghubung Cilacap dan Ciamis, sehingga bisa dilakukan kerjasama jalur wisata di ketiga daerah tersebut. Jalur destinasi wisata bisa dimulai dari Kabupaten Cilacap dengan keindahan pasir putih Pulau Nusakambangan, Pantai Widarapayung dan Pantai Teluk Penyu, kemudian dilanjutkan ke

Pangandaran melewati Kota Banjar dan kemudian sampai di Pangandaran yang memiliki Pantai Batukaras, Batu Hiu serta Grand Canyon Pangandaran.

Kerjasama ini bisa meningkatkan serta menggali potensi dari masing-masing daerah baik di Cilacap, Kota Banjar dan Ciamis. Cilacap bisa semakin memperindah pantainya dengan melengkapi sarana prasarana yang mampu memanjakan para wisatawan, kemudian Kota Banjar bisa menjadi wilayah transit untuk wisatawan yang melakukan destinasi wisata Cilacap-Pangandaran, Kota Banjar bisa menawarkan jasa perhotelan, wisata kuliner dan central oleh-oleh untuk wisatawan, dan Pangandaran, Ciamis juga bisa semakin memaksimalkan potensi wisata di setiap pantainya.

c. Peluang Kerjasama Aksesibilitas

Kabupaten Cilacap, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis merupakan jalur utama Pulau Jawa di wilayah jalur selatan setelah jalur pantai utara. Akses jalan yang baik merupakan hal

yang penting bagi jalur selatan ini. Namun pada kenyataannya jalur Cilacap-Banjar-Ciamis memiliki akses jalan yang kurang baik, banyak titik jalan yang rusak bahkan rusak berat di jalur tersebut, hal ini menghambat jalur tersebut. Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis bisa melakukan kerjasama dalam memperbaiki akses jalur selatan tersebut, karena dampaknya akan baik bagi perekonomian ketiga wilayah tersebut

d. Peluang Kerjasama Sistem Informasi

Peluang kerjasama lainnya yang dapat dilakukan di tiga wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah ini adalah kerjasama sistem informasi. Cilacap-Banjar-Ciamis bisa membuat sebuah website gabungan yang mampu menjadi salah satu informasi bagi masyarakat mengenai ketiga wilayah tersebut. Informasi yang di berikan bisa mengenai komoditas unggulan, industri, serta peluang investasi yang ditawarkan bagi para investor serta website ini juga bisa menjadi alat promosi baik destinasi wisata. Website ini harus terus diupdate

dengan informasi terbaru mengenai ketiga wilayah tersebut agar masyarakat atau investor bisa terus mengetahui perkembangan dari Wilayah Kabupaten Cilacap, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis.

Pengelola website bisa menyerap tenaga kerja dari ketiga wilayah, yang mampu mewakili setiap wilayah tersebut. Dengan adanya website ini diharapkan ketiga wilayah perbatasan ini bisa semakin dikenal oleh masyarakat dan mampu menarik minat investor untuk berinvestasi yang nantinya akan berdampak positif terhadap perkembangan ketiga wilayah perbatasan tersebut.

e. Peluang Kerjasama Pemasaran Komoditas Unggulan

Kabupaten Cilacap, Kota Banjar Patroman dan Kabupaten Ciamis bisa melakukan kerjasama dalam bidang pemasaran komoditas unggulan masing-masing daerah. Kerjasama ini mampu menjadi sarana masing-masing daerah untuk menjangkau pasar potensial yang semakin luas dalam memasarkan produk komoditas unggulan. Kerjasama ini

memfasilitasi pengiriman barang dan juga mampu menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan. Dengan kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para produsen komoditas unggulan di masing-masing daerah.

mampu meningkatkan perkembangan perekonomian. Rest Area bisa menjadi salah satu bidang kerjasama antara Kabupaten Cilacap, Kota Banjar Patroman dan Kabupaten Ciamis. Rest Area bisa dipusatkan di daerah perbatasan Cilacap-Banjar-Ciamis, yang dapat ditawarkan di Rest Area tersebut bisa berupa kebutuhan pokok sehari-hari, makanan khas dari Cilacap-Banjar-Ciamis, Central oleh-oleh dan lainnya.

KESIMPULAN

Kabupaten Cilacap memiliki wilayah yang cukup luas, dan memiliki central kawasan industri. Selain itu Cilacap memiliki transportasi yang lengkap seperti jalur laut, darat dan udara. Cilacap memiliki potensi pariwisata yang masih bisa dikembangkan lebih optimal seperti kawasan pantai Widarapayung dan Pulau Nusakambangan. Kabupaten Ciamis memiliki hasil perkebunan, pertanian serta perikanan yang melimpah dan menjadi komoditas unggulan. Ciamis memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan

f. Peluang Kerjasama Rest Area Wilayah Perbatasan

Rest Area merupakan sebuah tempat istirahat perjalanan yang mampu menjadi pusat perekonomian. Rest area mampu menarik wisatawan maupun masyarakat sekitar untuk berbelanja, yang diharapkan

lebih optimal dikawasan Pangandaran.

Kota Banjar merupakan kota yang berada tepat diperbatasan Provinsi Jawa tengah dan Provinsi Jawa Barat. Komoditas unggulan di Kota Banjar merupakan hasil perkebunan, peternakan dan pertanian. Potensi yang bisa dikembangkan di Kota Banjar adalah pusat perbelanjaan, fasilitas transportasi dan pembanguna hotel yang mampu menunjang perkembangan perekonomian Kota Banjar. Kerjasama dari tiga daerah perbatasan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dari masing-masing daerah. Semua pihak harus ikut mendukung kerjasama perbatasan ini baik dari pemerintah daerah, pihak swasta atau investor dan masyarakat.

Adapun bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh wilayah perbatasan Kabupaten Cilacap, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis adalah Peluang Kerjasama Komoditas, Peluang Kerjasama Jalur Wisata, Peluang Kerjasama Aksesibilitas, Peluang Kerjasama Akses Informasi, Peluang Kerjasama Pemasaran Komoditas Unggulan dan

Peluang Kerjasama Rest Area Wilayah Perbatasan dan kerjasama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. 1999. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik. Kab. Ciamis. 2011. *Ciamis Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Ciamis.

Badan Pusat Statistik. Kab. Cilacap. 2011. *Cilacap Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Cilacap.

Badan Pusat Statistik. Kota Banjar. 2011. *Kota Banjar Dalam Angka 2010*. BPS Kota Banjar.

Baldwin, Robert E. 1983. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*. ST. Dianjung [penerjemah]. Jakarta: Bina Aksara.

Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Edisi Pertama*. PT Pradya Paramitha: Jakarta.